

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2020

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



kepri.bawaslu.go.id



ppid.kepri.bawaslu.go.id



Humas dan Dokumentasi
Bawaslu Provinsi Kepri



Bawasluprovkepri



bawasluprovkepri



bawaslu_kepri



0812 8058 9070



ppidbawaslukepri@gmail.com



Jl. W.R Supratman No.4-7 Tanjungpinang

RINGKASAN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020

LATAR BELAKANG DAN LANDASAN

Latar belakang dan landasan dari laporan layanan informasi publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Setiap Badan Publik wajib membentuk PPID. Bawaslu merupakan Badan Publik sehingga wajib membentuk PPID.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019
Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
4. Pasal 33 – 35 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019
 - a. PPID wajib menyusun laporan layanan informasi publik yang terdiri dari:
Laporan layanan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir

SOP PPID BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Standar Operasional Prosedur (SOP)



SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi

SOP Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi

SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan di Lingkungan Bawaslu Provinsi

SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi

SOP Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi

MEDIUM INFORMASI PUBLIK DI

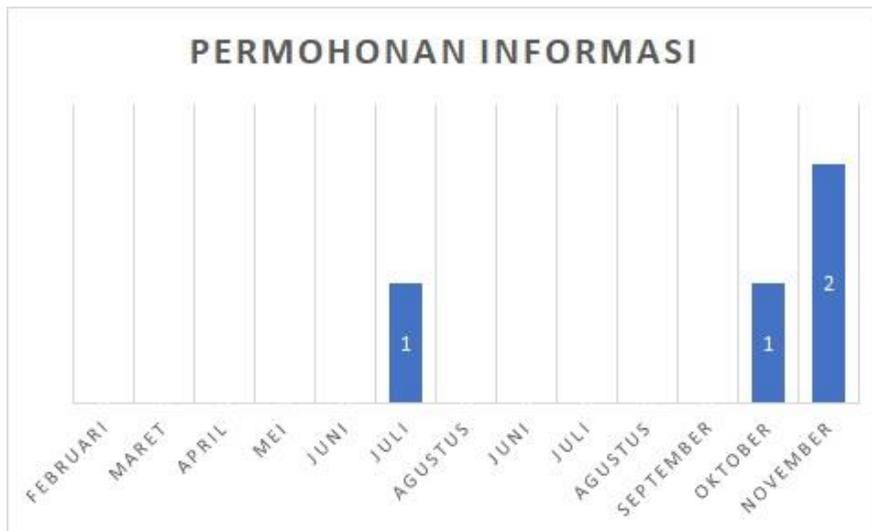
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



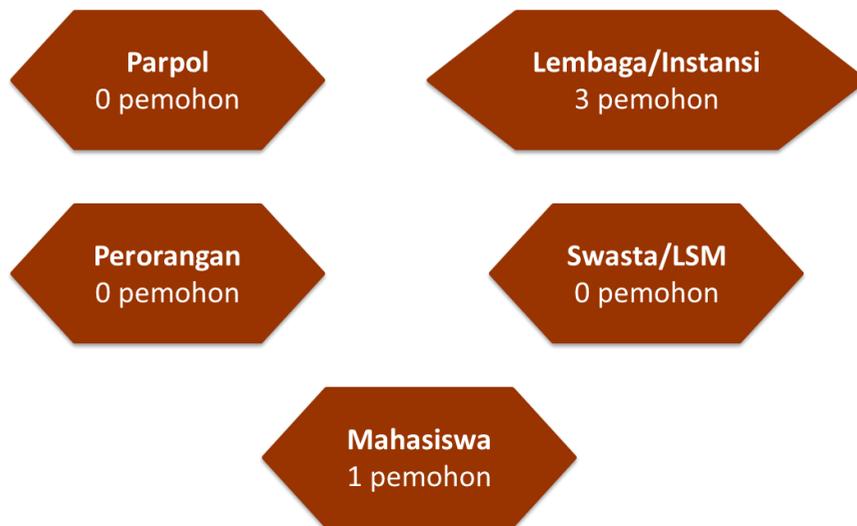
AKUN MEDIA SOSIAL DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2019		TAHUN 2020	
973 follower @Bawasluprovkepri		1.084 follower @Bawasluprovkepri	
582 follower @bawasluprovkepri		858 follower @bawasluprovkepri	
31 follower @bawaslu_kepri		124 follower @bawaslu_kepri	
39 subscriber Humas dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepri		264 subscriber Humas dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepri	
913 viewer https://kepri.bawaslu.go.id/		12.971 viewer https://kepri.bawaslu.go.id/	
322 viewer https://ppid.kepri.bawaslu.go.id/		1.143 viewer https://ppid.kepri.bawaslu.go.id/	

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI 2020



LATAR BELAKANG DAN KATEGORI PEMOHON



SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Cara Permohonan Informasi Publik	Jumlah	Presentase
1	Datang langsung ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	3	75 %
2	Menggunakan formulir online di web PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	1	25 %
3	Melalui telepon	0	0 %
4	Melalui email/surat	0	0 %
TOTAL		4	100 %

LAPORAN LENGKAP
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2020

BAB I

LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau menjadi bagian dari badan publik. Lembaga ini mengelola dan menggunakan anggaran negara dan keberadaannya bagian dari perintah Undang-Undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau harus mentaati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 PPID pasal 33 hingga 35 menyebutkan bahwa wajib menyusun laporan layanan. Bentuk laporan layanan informasi publik terdiri dari ringkasan laporan layanan dan laporan layanan. Selain itu, laporan layanan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan layanan informasi ini bagian dari upaya untuk melihat jejak rekam layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dengan begitu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Maka atas dasar tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyusun dan menerbitkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020.

BAB II

KONDISI PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Terbentuknya struktur Organisasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk memperkuat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Untuk terus membangun sistem pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga terus membenahi sarana dan prasana untuk mendukung operasional PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu titik fokus untuk terus memperbaiki layanan informasi publik. Berbagai terobosan juga dilakukan. Berbagai *platform* media internet dimanfaatkan untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Tak hanya di tingkat Provinsi, tetapi juga di 7 (tujuh) Bawaslu tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut kami sajikan data-data mengenai kondisi PPID dan layanan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

A. Keberadaan SOP

Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan. SOP ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

SOP yang sudah dibuat oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah:

1. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi
4. SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan di Lingkungan Bawaslu Provinsi
5. SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi
6. SOP Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 di antaranya:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

- Komputer yang terkoneksi dengan internet
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima informasi
- Daftar Informasi Publik (DIP)
- Tata cara permohonan informasi
- Brosur PPID
- Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon
- Dan lain-lain



Gambar 1 Ruang PPID Bawaslu Provinsi Kepri



Gambar 2 Ruang PPID Bawaslu Provinsi Kepri



Gambar 3 Ruang PPID Bawaslu Provinsi Kepri



Gambar 4 Peresmian Ruang PPID Bawaslu Provinsi Kepri Oleh Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, SH, LL.M, Ph.D

➤ Brosur PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

1. Menentukan jenis informasi yang dibutuhkan
2. Menentukan instansi yang mengelola informasi
3. Melakukan permohonan informasi
4. Menunggu pemohonan informasi diproses
5. Menerima informasi yang dibutuhkan

Visi Misi PPID

Visi
Terwujudnya PPID Bawaslu yang andal, profesional dan inovatif

Misi

1. Memenuhi hak publik atas informasi
2. Mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu
3. Mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel

PROSEDUR LAYANAN INFORMASI MELALUI WEBSITE PPID

1. Kunjungi Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui PC atau melalui ponsel kesayangan Anda kepri.bawaslu.go.id/ppid
2. Lakukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan informasi pada website PPID
3. Pemohon mendapatkan Pemberitahuan Pemberitahuan Informasi Ditrima atau Ditolak

Waktu Pelayanan Informasi

Senin s.d. Jum'at
08.00 - 15.00
(0771) 4444074
kepri.bawaslu.go.id/ppid

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

```

    graph TD
      A[Pejabat & Kepala PPID  
Atas dan Pejabat  
Badan Penyelenggara Pemilu] --> B[Atas PPID  
Kepala Sekelompok  
Badan Penyelenggara Pemilu]
      A --> C[Ten Terhinggaan PPID  
Pejabat  
Badan Penyelenggara Pemilu]
      B --> D[PPID  
Bendahara Kelompok  
Badan Penyelenggara Pemilu]
      D --> E[Pejabat Layanan Informasi  
Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau]
    
```

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi PPID

Jl. WR. Supratman No. 4-7 Km.8
Tanjungpinang - Kepulauan Riau
kepri.bawaslu.go.id
kepri.bawaslu.go.id/ppid
(0771) 4444074
ppidbawasluprovkepri@gmail.com

Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya

Gambar 5 Brosur PPID Bawaslu Provinsi Kepri

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sesuai dengan Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14 adalah:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
5. Pengujian konsekuensi
6. Pengklasifikasian informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik antara lain:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik

2. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan setiap unit/ satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan

3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman (media yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan) dan/atau permohonan

Sumber / Dasar Hukum

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Perpres RI No. 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Perbawaslu No. 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
7. Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya ! Semboyan ini menggambarkan kesadaran kami terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
3. Menyusun dan menetapkan standar operasional (SOP) informasi publik
4. Melakukan pengujian konsekuensi
5. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Gambar 6 Brosur PPID Bawaslu Provinsi Kepri

➤ Maklumat PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

BERSAMA SAMA BAWASLU TEGAKKAN RAKYAT PEMILU
#BawasluMengawasi #CegahAwasiTindak

BAWASLU DALAM MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK

- 1 Menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik secara akurat dan tepat;
- 2 Merespon dengan cepat sesuai waktu yang tertera dalam Perbawaslu No. 7 tahun 2012;
- 3 Menyediakan sarana dan fasilitas yang tertata baik dan media yang dapat diakses secara online;
- 4 Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 5 Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah.

Tanjungpinang, 1 April 2020
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Yessi Yunius, SE., M.Si.
Humas dan Dokumentasi
Bawaslu Provinsi Kepri

kepri.bawaslu.go.id | ppid.kepri.bawaslu.go.id | Bawasluprovkepri | bawaslu_kepri | bawasluprovkepri | Humas dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepri

Gambar 7 Maklumat PPID Bawaslu Provinsi Kepri

➤ Formulir permohonan informasi (*online*)

Formulir Permohonan Informasi

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor Handphone

Email
nama@domain.com

Rincian Yang Dibutuhkan (Tambah Keterangan Bila Perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Upload KTP

Cara Memperoleh Informasi**

Cara Mendapatkan Informasi **

Gambar 8 Formulir Permohonan Informasi (*online*)

➤ Formulir permohonan informasi (*offline*)

 BAWASLU <small>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU</small>	BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau Telp/Fax. 0771-4444074, bawaslu.provkepri@gmail.com Laman : kepri.bawaslu.go.id : ppid.kepri.bawaslu.go.id
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran (<i>diisi petugas</i>)** :	
Nama : Alamat : Pekerjaan : Nomor Telepon/Email : Rincian Informasi yang dibutuhkan : (tambahkan kertas bila perlu) Tujuan Penggunaan Informasi Cara Memperoleh Informasi***: 1. <input type="checkbox"/> Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat**** 2. <input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan Informasi (<i>hardcopy/softcopy</i>)**** Cara mendapatkan Salinan Informasi***: 1. <input type="checkbox"/> Mengambil Langsung 2. <input type="checkbox"/> Kurir 3. <input type="checkbox"/> Pos 4. <input type="checkbox"/> Faksimile 5. <input type="checkbox"/> E-mail	
Tanjungpinang, 2020	
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan) (.....) Nama dan Tanda Tangan	Pemohon Informasi (.....) Nama dan Tanda Tangan
Keterangan : * Pilih salah satu ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi *** Pilih salah satu dengan member tanda (v) **** Coret yang tidak perlu	

Gambar 9 Formulir Permohonan Informasi (*offline*)

➤ Tanda bukti formulir permohonan informasi

 BAWASLU <small>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU</small>	BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau Telp/Fax. 0771-4444074, bawaslu.provkepri@gmail.com Laman : kepri.bawaslu.go.id : ppid.kepri.bawaslu.go.id
TANDA BUKTI FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI	
Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik: a. Nama : b. Alamat : c. Tanggal penyerahan formulir permohonan : d. Nomor Registrasi Permohonan :	
Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik: a. Nama : b. Alamat :	
Tanjungpinang, 2020	
Yang menerima (Petugas Pelayanan) (.....) Nama dan Tanda Tangan	Yang menyerahkan (Pemohon Informasi) (.....) Nama dan Tanda Tangan

Gambar 10 Tanda Bukti Formulir Permohonan Informasi

2. Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

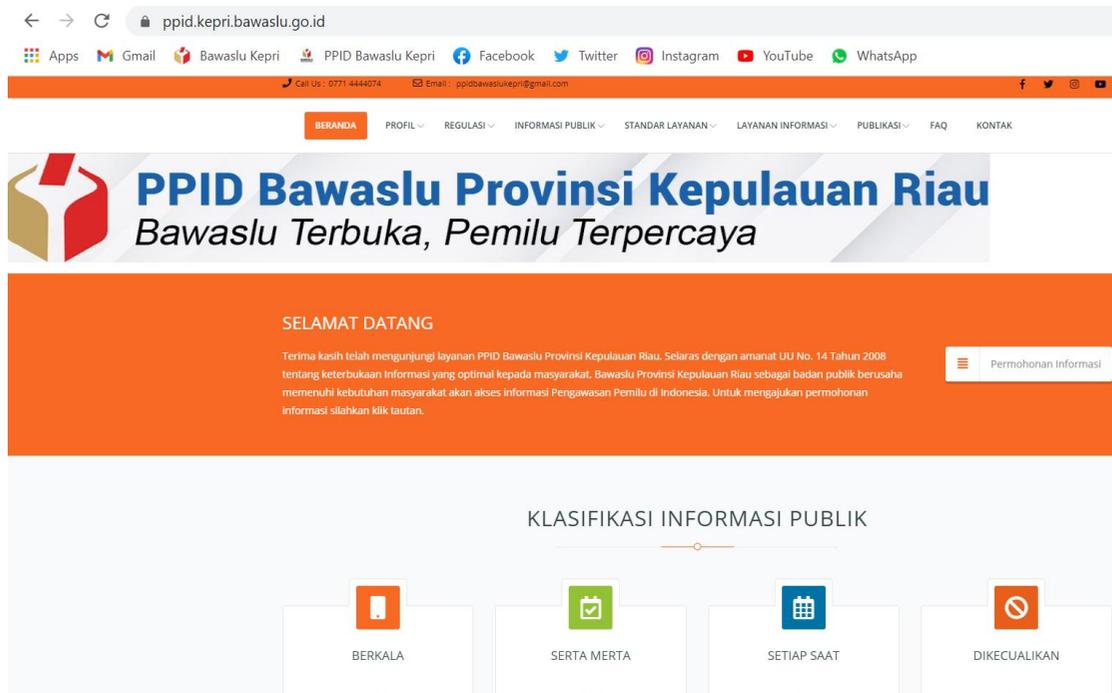
Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beralamat di: **www.ppid.kepri.bawaslu.go.id**. Melalui website PPID, publik bisa dengan mudah mendapatkan berbagai dokumen data dan informasi. Caranya dengan mengklik dan mengunduh dokumen tersebut. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus memperbanyak publikasi data dan dokumen di website PPID.

Website yang dibangun pada awal November 2019 dan saat ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait data-data pengawasan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dapat meminta informasi kepemiluan secara *online* tanpa harus datang langsung ke Pusat Pelayanan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Selain menghemat waktu, permohonan informasi melalui website PPID juga lebih cepat, efektif dan efisien.



Gambar 11 Website Utama Bawaslu Provinsi Kepri



Gambar 12 Website PPID Bawaslu Provinsi Kepri

3. Penyediaan Akses Informasi

Penyediaan akses informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui berbagai jalur, baik yang konvensional maupun yang millennial. Prinsip dasarnya, akses layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau harus cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana.

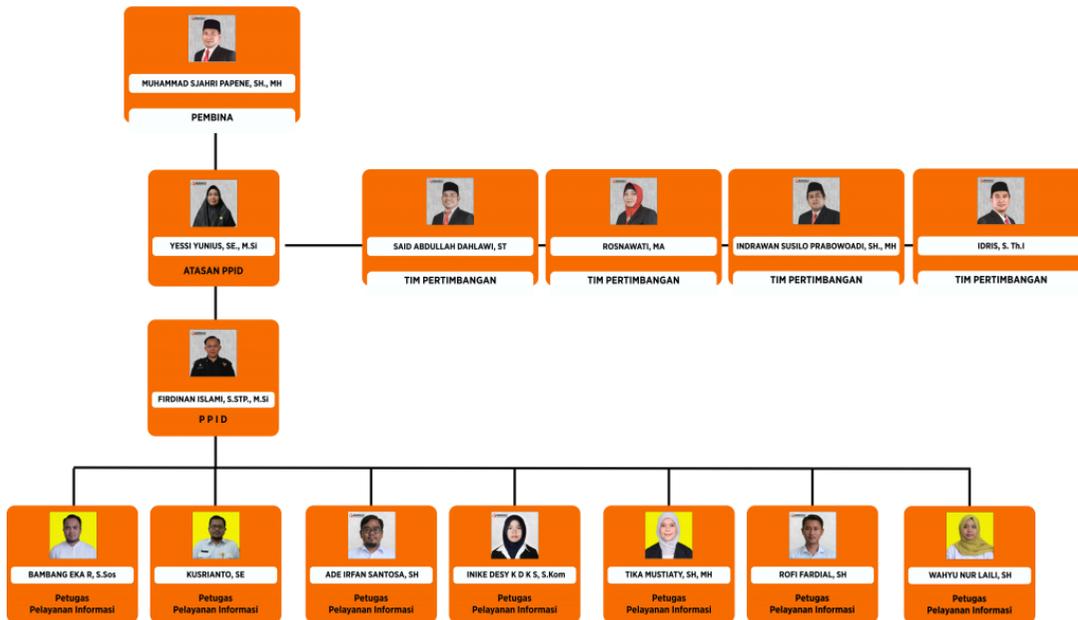
Beberapa medium akses informasi itu adalah:

- Datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan alamat Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau
- Melalui Hotline PPID 0812 8058 9070 (WhatsApp / Telepon)
- Melalui Telepon Kantor 0771 4444074
- Mengisi formulir *online* pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau <http://ppid.kepri.bawaslu.go.id>
- Mengajukan permohonan melalui email ppidbawaslukepri@gmail.com
- Mengajukan permohonan dengan menghubungi melalui Hotline PPID 0812 8058 9070 (WhatsApp / Telepon) atau melalui Telepon Kantor 0771 4444074
- Mendownload informasi melalui website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang dikelola oleh Divisi Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Penyediaan akses melalui website diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi secara online agar lebih cepat, efisien dan efektif dalam pengelolaan layanan informasi publik

C. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020



Gambar 13 Struktur PPID Bawaslu Provinsi Kepri

Secara operasional PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dikelola oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Sekretariat, pejabat struktural beserta staf/fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 029/K.Bawaslu-KR/HM.00/IV/2020) adalah sebagai berikut :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H) selaku Pembina PPID
2. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi (Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H) selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal (Idris, S.Th.I) selaku Tim Pertimbangan PPID
4. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa (Rosnawati, M.A) selaku Tim Pertimbangan PPID
5. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi SDM & Organisasi (Said Abdullah Dahlawi, S.T) selaku Tim Pertimbangan PPID
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Yessi Yunius, S.E., M.Si) selaku Atasan PPID
7. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas (H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si) selaku PPID

8. Plt. Kepala Sub Bagian Humas dan Hubal (Inike Desy Kristianti Diyah Kusumawati Suryaningrum, S.Kom) selaku Petugas Layanan Informasi
9. Plt. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa dan Hukum (Rofi Fardial, S.H) selaku Petugas Layanan Informasi
10. Plt. Kepala Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data & Informasi (Ade Irfan Santoso, S.H) selaku Petugas Layanan Informasi
11. Staf Bagian Hukum (Wahyu Nur Laili, S.H) selaku Petugas Layanan Informasi
12. Staf Bagian SDM & Organisasi (Kusrianto, S.E) selaku Petugas Layanan Informasi
13. Staf Bagian Penindakan Pelanggaran (Tika Mustiaty, S.H., M.H) selaku Petugas Layanan Informasi
14. Staf Bagian Tata Usaha (Bambang Eka Rufiantino, S.Sos) selaku Petugas Layanan Informasi.

D. Kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Selain mengelola keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, selama 2020 PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 antara lain:

1. Melakukan Bimbingan Teknis ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, mendorong kelengkapan sarana dan prasana PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, membangun *website* PPID untuk mempermudah pelayanan informasi kepada publik
2. Bersama dengan bidang kehumasan, melakukan berbagai program dengan memanfaatkan berbagai *platform* media untuk secara aktif menyebarkan informasi kepada publik, di antaranya:
 - membuat siaran pers secara berkala
 - adanya group *WhatsApps* jurnalis sebagai sarana mempercepat penyebaran informasi melalui media arus utama
 - penerbitan jurnal secara berkala
 - penerbitan buku
 - sosialisasi melalui poster dan video
 - diskusi tema-tema aktual yang disiarkan secara langsung melalui media sosial (*live streaming*) dan bersifat interaktif dengan public
 - dan lain-lain
3. Membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk keterbukaan informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

**E. Media Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Media Bawaslu Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Penunjang Keterbukaan Informasi**

Media Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

No	Media	Alamat Akun	Jumlah Post	Jumlah Pengunjung/ Follower
1	Website utama	https://kepri.bawaslu.go.id/	226	12.971
2	Website PPID	https://ppid.kepri.bawaslu.go.id/	16	1.143
3	Instagram	https://www.instagram.com/bawasluprovkepri/	490	858
4	Facebook	https://web.facebook.com/BawasluProvKepri	460	1.084
5	Twitter	https://twitter.com/bawaslu_kepri	622	124
6	Youtube	Humas dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepri	57	263

Website Utama Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Bawaslu Kabupaten/Kota	Alamat Website	Jumlah Post
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	http://tanjungpinangkota.bawaslu.go.id/	32
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	https://bintankab.bawaslu.go.id/	199
3	Bawaslu Kota Batam	https://batamkota.bawaslu.go.id/	35
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	http://karimunkab.bawaslu.go.id/	87
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	http://linggakab.bawaslu.go.id/	93
6	Bawaslu Kabupaten Kep. Anambas	http://anambaskab.bawaslu.go.id/	11
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	https://natunakab.bawaslu.go.id/	64

Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Kabupaten/Kota	Alamat Website PPID
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	http://ppid.tanjungpinangkota.bawaslu.go.id/
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	https://ppid.bintankab.bawaslu.go.id/
3	Bawaslu Kota Batam	http://ppid.batamkota.bawaslu.go.id/
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	https://ppid.karimunkab.bawaslu.go.id/
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	http://ppid.linggakab.bawaslu.go.id/
6	Bawaslu Kabupaten Kep. Anambas	http://ppid.anambaskab.bawaslu.go.id/
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	http://ppid.natunakab.bawaslu.go.id/

Keterangan : Data diambil pada tanggal 27 November 2020

Jumlah berita dan informasi yang dipublikasi di media sosial Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dari Januari - November 2020

No	Nama Bawaslu	Facebook	Jumlah Post	Instagram	Jumlah Post	Twitter	Jumlah Post	Youtube	Jumlah Post
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	https://www.facebook.com/TanjungpinangBawaslu/	550	https://www.instagram.com/bawaslutanjungpinang/	370	https://twitter.com/Bawaslu_TPI	370	Humas Bawaslu Kota Tanjungpinang	32
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	https://facebook.com/bawaslubintankab/	730	https://www.instagram.com/bawaslubintan/	695	https://twitter.com/BawasluBintan	356	Bawaslu Kabupaten Bintan	40
3	Bawaslu Kota Batam	https://www.facebook.com/Bawaslu-Kota-Batam-Oficial-101152824945342/	17	https://www.instagram.com/bawaslu_kota_batam/	204	https://twitter.com/BawasluBatam	334	Bawaslu Batam	7
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	https://web.facebook.com/bawaslukabupatenkarimun/	360	https://www.instagram.com/bawaslukarimun/	344	https://twitter.com/BawasluKarimun	530	Humas Bawaslu Karimun	29
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	https://www.facebook.com/bawaslu.kabupatenlingga	343	https://www.instagram.com/bawaslukabupatenlingga/	380	https://twitter.com/Bawaslu_lingga	231	Humas Bawaslu Kabupaten Lingga	69
6	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	https://facebook.com/bawaslukapanambas/	245	https://www.instagram.com/bawasluanambas/	392	https://twitter.com/bawasluanambas	45	Bawaslu Anambas	3
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	https://www.facebook.com/BawasluKabupatenNatuna/	452	https://www.instagram.com/bawaslukabnatuna/	493	https://twitter.com/BawasluNatuna	323	Bawaslu Kabupaten Natuna	22

Jumlah follower atau subscriber di media sosial Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dari Januari - November 2020

No	Nama Bawaslu	Facebook	Follower	Instagram	Follower	Twitter	Follower	Youtube	Subscriber
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	https://www.facebook.com/TanjungpinangBawaslu/	268	https://www.instagram.com/bawaslutanjungpinang/	943	https://twitter.com/Bawaslu_TPI	45	Humas Bawaslu Kota Tanjungpinang	25
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	https://facebook.com/bawaslubintankab/	634	https://www.instagram.com/bawaslubintan/	1.288	https://twitter.com/BawasluBintan	222	Bawaslu Kabupaten Bintan	69
3	Bawaslu Kota Batam	https://www.facebook.com/Bawaslu-Kota-Batam-Oficial-101152824945342/	116 / 629	https://www.instagram.com/bawaslu_kota_batam/	288	https://twitter.com/BawasluBatam	63	Bawaslu Batam	10
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	https://web.facebook.com/bawaslukabupatenkarimun/	675	https://www.instagram.com/bawaslukarimun/	1.025	https://twitter.com/BawasluKarimun	85	Humas Bawaslu Karimun	129
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	https://www.facebook.com/bawaslu.kabupatenlingga	446	https://www.instagram.com/bawaslukabupatenlingga/	910	https://twitter.com/Bawaslu_lingga	102	Humas Bawaslu Kabupaten Lingga	62
6	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	https://facebook.com/bawaslukepanambas/	151	https://www.instagram.com/bawasluanambas/	544	https://twitter.com/bawasluanambas	17	Bawaslu Anambas	3
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	https://www.facebook.com/BawasluKabupatenNatuna/	99 / 4999	https://www.instagram.com/bawaslukabnatuna/	563	https://twitter.com/BawasluNatuna	79	Bawaslu Kabupaten Natuna	42

F. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 130.000.000 dari APBN Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 55.132.000 dari APBD Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Dengan total anggaran Rp 185.132.000 yang dimiliki, anggaran ini akan digunakan untuk pengembangan dan inovasi-inovasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan kehumasan yang juga termasuk di dalamnya yaitu kegiatan PPID. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya dibahas pada Bab G (Kegiatan Kehumasan dan PPID Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2020) di bawah ini.

G. Kegiatan Kehumasan dan PPID Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2020

Kegiatan Kehumasan dan PPID yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, diantaranya:

1. **Pemahaman Tentang SOP PPID.** Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Jumat (08/05/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Sulastio, Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI dan Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Si, M.Si, Direktur UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, tim PPID Bawaslu Provinsi Kepri, Koordinator Sekretariat beserta tim pengelola PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri.



2. **Pembuatan Penulisan Berita, Fotografi dan Videografi.** Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Rabu (13/05/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu, Nikolas Panama, SH., M.Pd, Pewarta LKBN Antara dan Andri Mediansyah, Fotografer Inilah Kepri. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.



3. **Pemahaman Tentang PPID dan PPID Online.** Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Kamis (14/05/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Si, M.Si, Direktur UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Haryo Sudrajat, Kasubbag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.





4. **Strategi dan Kiat Meningkatkan Rating dan Popularitas Media Sosial.** Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Jumat (15/05/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Sulastio, Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI dan Baguz Dwi Pradana, Staf Bagian Humas dan Hubal Bawaslu RI. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.



5. **Media Gathering 2020, Bersama Media Membangun Sinergi Berkualitas.** Dilaksanakan secara tatap muka pada hari Rabu (01/07/2020). Kegiatan yang bersifat diskusi dan sharing ini dihadiri rekan-rekan jurnalis dari AJI, PWI, IWO, SMSI, IJTI, RRI dan Antara Kepri.



6. **Rapat Dalam Kantor Penguatan Kapasitas Kehumasan Dalam Membuat Desain Grafis Menggunakan Photoshop.** Dilaksanakan secara tatap muka hari Selasa (18/08/2020). Menghadirkan narasumber praktisi desain Kepri, Tommy Surya Adijaya. Peserta kegiatan ini adalah Anggota, Kasek dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri.



7. **Penguatan Kapasitas Kehumasan – Peran Web & Media Sosial dalam Pilkada Tahun 2020.** Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Kamis (17/09/2020). Narasumber kegiatan ini yaitu Sulastio Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI, Haryo Sudrajat Kasubbag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI, dan Septiaji Eko Nugroho Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi

Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.



8. **Peningkatan Fungsi PPID di Era Keterbukaan Informasi.** Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Kamis (17/09/2020). Narasumber kegiatan ini yaitu Haryo Sudrajat Kasubbag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.



9. **Penyelesaian Sengketa Informasi.** Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Jumat (18/09/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Sulastio, Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI dan Ferry Muliadi Manalu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang termasuk di dalam struktur PPID.



10. **Media Gathering - Peran Strategis Media dalam Mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.** Dilaksanakan secara tatap muka pada hari Jumat (16/10/2020). Narasumber *Media Gathering* pada sesi pagi adalah Zakmi, Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan dan Jailani, Ketua AJI Tanjungpinang. Kegiatan yang bersifat diskusi dan sharing ini dihadiri oleh Kordiv Hukum, Humas dan Datin Indrawan Susilo Prabowoadi, Kordiv Pengawasan dan Hubal Idris, Kordiv Penyelesaian Sengketa Rosnawati beserta awak media dari PWI, AJI, RRI, Mercy FM, Pandawa FM, Onine FM dan Bintang Radio FM.

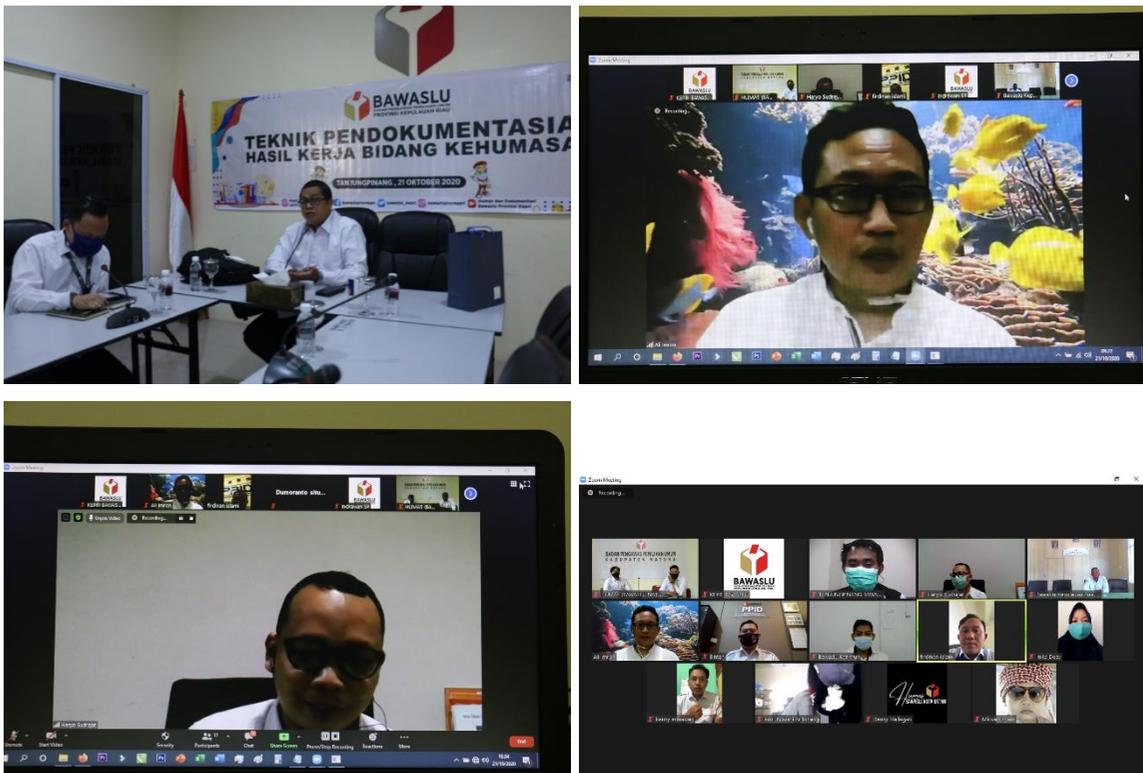


11. **Media Gathering - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19.** Dilaksanakan secara tatap muka pada hari Jumat (16/10/2020). Narasumber *Media Gathering* pada sesi siang adalah Nikolas Panama dari LKBN Antara. Kegiatan yang bersifat diskusi dan sharing ini dihadiri oleh Kordiv Hukum, Humas dan Datin

Indrawan Susilo Prabowoadi, Kordiv Pengawasan dan Hubal Idris beserta awak media IWO dan IJTI.



12. **Penguatan Kapasitas Kehumasan - Teknik Pendokumentasian Hasil Kerja Bidang Kehumasan.** Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Rabu (21/10/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Ahmad Ali Imron, Kasubbag Humas Bawaslu RI dan Haryo Sudrajat, Kasubbag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang termasuk di dalam struktur PPID.



13. **Penandatanganan MoU Gugus Tugas Pengawasan Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.** Dilaksanakan di Batam pada hari Kamis (19/11/2020). Bawaslu Provinsi Kepri

melaksanakan penandatanganan MoU bersama KPU Provinsi Kepri, Polda Kepri, Diskominfo Provinsi Kepri, dan KPID Provinsi Kepri.



14. **Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.** Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan dua Jurnal. Jurnal edisi pertama terbit pada Oktober 2019 dengan tema besar Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Jurnal edisi kedua terbit pada Juli 2020 dengan tema besar Menakar Problematika Pilkada 2020. Jurnal edisi pertama dapat diunduh [disini](#) dan Jurnal edisi kedua dapat diunduh [disini](#).



H. Kegiatan Kehumasan dan PPID Yang Akan Dilaksanakan Tahun 2020

Kegiatan Kehumasan dan PPID yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, diantaranya:

1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).
2. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi Ketiga.
3. Buku Bawaslu Dalam Angka Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Media Gathering Pasca Pemilihan Kepala Daerah 2020.
5. Pengembangan dan inovasi website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

BAB III

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2020

Tahun	Jumlah Permohonan	Permohonan Dikabulkan Seluruhnya	Permohonan Dikabulkan Sebagian	Permohonan Tidak Dikabulkan
2020	4	4	0	0
Persentase		100 %	0 %	0 %

Permohonan informasi selama 2020 tersebut tersebar di berbagai bulan seperti tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	25 %	50 %	0 %
Total : 100 %											

B. Sengketa Informasi

Terkait dengan sengketa informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama 2020 tidak adanya sengketa informasi. Baik pemohon yang mengajukan sengketa keberatan ke atasan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau maupun sengketa yang bergulir di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

C. Medium Permohonan Informasi

Jumlah permohonan informasi ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama 2020 sebanyak 0 permohonan, dari jumlah itu para pemohon menggunakan berbagai cara/medium untuk mengajukan permohonan, yakni:

Medium	Jumlah	Prosentase
Datang langsung ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	3	75 %
Menggunakan formulir online di website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	1	0 %
Melalui telepon	0	0 %
Melalui email/surat	0	0 %
TOTAL	0	0 %

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa telah ada pemohon informasi yang meminta informasi ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, baik datang langsung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ataupun menggunakan formulir online di website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Dari data di *dashboard website* PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga didapati data bahwa pengunjung halaman yang paling banyak adalah Informasi Berkala sebesar 13.6%, disusul oleh Informasi Dikecualikan 8.28%, kemudian Informasi Serta Merta 7.98%, dan Informasi Setiap Saat 7.1%.

D. Pemohon, Waktu, dan Status Permohonan

Waktu pelayanan permohonan informasi

No	Nama	Waktu Yang Diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	
1.	Bobby Perlindungan Laia	5 Hari	Ya	-	-	-
2.	Muhammad Rizki	2 Hari	Ya	-	-	-
3.	Rama	2 Hari	Ya	-	-	-
4.	Hendrija	2 Hari	Ya	-	-	-

Detail permohonan informasi publik di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2020.

No	Tanggal Pemohon	Nama	Asal / Instansi	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban
1.	9 Juli 2020	Bobby Perlindungan Laia	Mahasiswa	Materi Kesiapan Penegakan Hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah	Menambah wawasan	Diberikan softfile materi
2.	28 Oktober 2020	Muhammad Rizki	BPS Kepri	Informasi terkait IKP	Sebagai laporan	Diberikan salinan
3.	12 November 2020	Rama	Kejati Kepri	Data IKP 2020	Sebagai laporan	Diberikan softfile
4.	25 November 2020	Hendrija	Pol PP Kepri	Pokja Covid-19	Sebagai laporan	Diberikan softfile

E. Perkembangan di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Bawaslu Kabupaten/Kota	Desk Informasi	Jumlah Pemohon Datang Langsung
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	Ada	0
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	Ada	0
3	Bawaslu Kota Batam	Ada	0
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	Ada	0
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	Ada	1
6	Bawaslu Kabupaten Kep. Anambas	Ada	0
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	Ada	0

F. Ruang PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

1. Bawaslu Kota Tanjungpinang



2. Bawaslu Kota Batam



3. Bawaslu Kabupaten Bintan



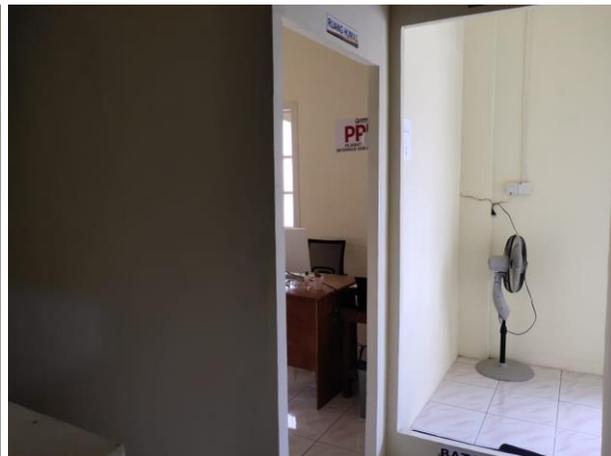
4. Bawaslu Kabupaten Karimun



5. Bawaslu Kabupaten Lingga



6. Bawaslu Kabupaten Natuna



7. Bawaslu Kabupaten Kep. Anambas



G. Inovasi Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki inovasi menarik terkait Kehumasan dan PPID. Beberapa terobosan itu diantaranya:

1. Bawaslu Kabupaten Bintan

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan inovasi menarik, yaitu menyediakan Kanal Rujukan Periksa Konten Hoax yang dapat digunakan mengecek kebenaran suatu informasi atau berita. Laman kanal dapat dikunjungi di <https://bintankab.bawaslu.go.id/patroli-siber-pilkada/>. Bawaslu Kabupaten Bintan juga membuat sebuah forum diskusi digital untuk Panwascam se-Kabupaten Bintan, di <https://forum.panwascam.id/index.php?r=dashboard%2Fdashboard>. Ajukan permohonan informasi secara online di <https://ppid.bintankab.bawaslu.go.id/>.

2. Bawaslu Kabupaten Karimun

Bawaslu Kabupaten Karimun membuat terobosan dalam memudahkan pelaporan dugaan pelanggaran secara online yang dapat dilihat di beranda website utama di <https://karimunkab.bawaslu.go.id/>. Bawaslu Kabupaten Karimun juga menyediakan fitur survey pengunjung di beranda website utamanya. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Karimun memiliki Pustaka Digital, dimana kita dapat mengunduh karya Jurnalistik Bawaslu. Laman Pustaka Digital dapat dilihat di <https://karimunkab.bawaslu.go.id/perpustakaanadigital/>. Ajukan permohonan informasi secara online di https://ppid.karimunkab.bawaslu.go.id/?page_id=68.

3. Bawaslu Kabupaten Lingga

Bawaslu Kabupaten Lingga banyak membuat terobosan dalam bentuk video, baik itu berupa Podcast maupun video-video tutorial yang dapat dilihat di kanal YouTube Bawaslu Kabupaten Lingga di <https://www.youtube.com/channel/UCwzplIICP3G7LvL5XiPEvJA>. Ajukan permohonan informasi secara online di <http://ppid.linggakab.bawaslu.go.id/permohonan-informasi/>.

4. Bawaslu Kabupaten Natuna

Bawaslu Kabupaten Natuna memiliki Pustaka Digital, dimana kita dapat mengunduh karya Jurnalistik Bawaslu. Laman Pustaka Digital dapat dilihat di <https://natunakab.bawaslu.go.id/pustaka-digital/>. Ajukan permohonan informasi secara online di <https://ppid.natunakab.bawaslu.go.id/permohonan-informasi/>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kendala

Kendala Internal:

1. Staf PPID di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau masih sangat terbatas.
2. Untuk ruangan khusus PPID baru tersedia di akhir bulan Mei 2020 ini.
3. Keberadaan dokumen data dan informasi milik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sudah terdigitalisasi dan tertata rapi dengan baik.
4. Belum maksimalnya dalam pelaksanaan tugas oleh petugas dalam struktur PPID.

Kendala Eksternal:

1. Keberadaan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menjadi sarana yang efektif untuk penyebaran informasi. Website ini pun baru terbangun pada bulan Oktober 2019.
2. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

B. Rekomendasi

1. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2021 ini menargetkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan informasi baik dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID.
2. Dari sisi teknologi informasi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga terus berkoordinasi dan mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan website PPID di 7 (tujuh) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau ini, terlebih lagi pada tahun ini di Provinsi Kepulauan Riau akan dilaksanakannya Pilkada, sehingga keterbukaan informasi publik sangatlah penting dan permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat dapat lebih efektif dan efisien.
3. Kumpulan hasil karya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau seperti jurnal, buku, maupun hasil karya lainnya dapat dipajang di ruangan PPID, sehingga pemohon dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi serta mengetahui apa saja karya yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
4. Digitalisasi data dan informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu prioritas untuk menyelamatkan data dan dokumen yang ada.
5. Terus mendorong dan melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu juga melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) petugas desk informasi PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan

Riau. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi lebih baik dalam hal pelayanan informasi, baik dari segi ruangan, sarana prasarana, maupun media sosial.

C. Penutup

Demikian laporan layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2020 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi catatan, evaluasi dan refleksi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kritik dan saran dari berbagai pihak tetap kami harapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan perbaikan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Semoga laporan ini bermanfaat.



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU